

manakah konsep tentang bangunan politik Indonesia yang berupa negara kebangsaan itu diambil? Apakah gagasan yang berupa barang import dengan segala kelemahan genetis yang dimilikinya tersebut masih mungkin dipertahankan? Adakah kemungkinan untuk lahirnya pemikiran alternatif tentang model bangunan politik Indonesia?

Tulisan ini tidaklah berpretensi untuk menjawab semua pertanyaan di atas, tetapi berbagai pertanyaan tersebut kiranya akan membantu mengarahkan perhatian pembahasan dalam tulisan ini pada persoalan utama yang berkaitan dengan topik Indonesia sebagai *floating state*.

Urgensi untuk hadirnya pemikiran alternatif, berupa perspektif teori yang orisinal mengingat seiring dengan berhubusnya era globalisasi yang dimulai pada akhir-abad XX dunia mengalami perubahan besar-besaran dan fundamental melingkupi bangunan politik negara, bahkan sampai muncul ungkapan bahwa era globalisasi merupakan *the end of the nation-state* (Harry Tjan Silalahi, 2002).²⁷ Oleh karenanya, merupakan tuntutan yang mutlak upaya pencerdasan dan pencerahan bangsa di Indonesia. Hal demikian karena sejak 40 tahun lebih bangsa Indonesia dalam masalah pencerdasan otak sebagai dimensi *kognitif* sudah lama tercemar oleh budaya politik yang serba hegemonik dan otoritarian. Akibatnya sangat parah, otak manusia Indonesia telah menjadi tawanan kepentingan politik sesaat melalui berbagai bentuk indoktrinasi yang melelahkan dan akhirnya melumpuhkan. Hanya sedikit orang Indonesia yang mampu mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan kreatifnya.²⁸

Dengan keberanian seperti ini, memungkinkan untuk memiliki sikap terbuka untuk mendudukkan serta mendiskusikan eksistensi *nation-state* dalam kerangka khasanah puncak-puncak pemikiran dari peradaban bangsa lain, dengan tanpa beban namun dengan tetap bersikap kritis. Melalui energi kreatif-kritis dan independen dalam membaca fenomena kehidupan politik di Indonesia termasuk kapabilitas bangunan politiknya, akan diketahui bahwa berbagai perspektif teori politik khususnya tentang bangunan dan konfigurasi

²⁷

Harry Tjan Silalahi, "Pemahaman BARU KEBANGSAAN", dalam Merumuskan kembali kebangsaan Indonesia, Indra J. Piliang, Center for Strategic and International Studies, 2002: 7.
²⁸ Ahmad Syafiq Maarif, Indonesia Pergumulan Antara Keprithatnan dan Harapan Masa Depan, Pidato Dies Natalis UNY tanggal 21 Mei 2003, hal. 10.

politik Indonesia selama ini adalah mengandung bias negara –rezim Orde Baru- yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hegemoni kekuatan politik kapitalisme internasional.²⁴ Bangunan politik yang memiliki karakter utama sekuler tersebut, ternyata telah gagal untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bangunan politik Indonesia hingga awal abad dua puluh satu, belum menunjukkan sebagai sebuah bangunan politik yang mendapatkan dan memiliki dukungan dari basis nilai-nilai yang hidup dan berkembang di Indonesia. Bangunan politik yang secara resmi diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bahan-bahan bakunya tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur dasar yakni; *Pertama*, peradaban asli (*indigenous*) Indonesia yang masih goyah, belum mendapatkan tempat berpijak yang kokoh. *Kedua* pengaruh peradaban Islam, dan yang *ketiga* pengaruh peradaban Barat yang hadir melalui penjajahan.

Struktur sosial politik masyarakat Indonesia setelah mengalami perkawinan dengan pengaruh peradaban Barat yang dipaksakan melalui proses kolonialisasi. Perkembangannya menjadi mengalami ke-terputusan rantai sejarah peradaban, termasuk musnahnya negara-negara pribumi²⁵ dan akhirnya mengidap kelemahan mendasar yaitu memiliki gap dengan budaya asli Indonesia, termasuk di dalamnya juga bangunan politik Indonesia yang lebih terasa tipikalnya sebagai barang impor. Mungkin tidak berlebihan jika kondisi negara Indonesia yang demikian sampai hari ini, dilukiskan sebagai *the floating state*.

Terminologi *the floating state*, dalam konteks bahasan ini dipakai untuk melukiskan serta menggambarkan bahwa bangunan politik negara Indonesia sebagai sebuah *nation-state* dengan segenap perangkatnya, belum mendapatkan dukungan mantap dari mayoritas unsur bangsa Indonesia baik dari sisi budaya, nilai-nilai yang hidup dan berkembang di Indonesia, moralitas, adat, serta politik yang diturunkan dari nilai-nilai agama. Ini terbukti, bahwa sampai awal abad XXI masih ada resistensi yang muncul dari elemen bangsa Indonesia

²⁴ Arief Budiman, "Theories of The Capitalist Nature of the State in Indonesia", Pierre James, "State Theories and New Order Indonesia", dalam State and civil society, Center of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990: 5, 15, lihat juga Kalim Siddiqui, in Pursuit of The Power of Islam, khususnya pada babasan tentang "Beyond the Muslim Nation-state", Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2002, hal. 114-127.

²⁵ Harsya W. Bachtiar, "Integrasi Nasional Indonesia" makalah diterbitkan dalam buku dengan judul, Wawasan Kebangsaan Indonesia, Gajasan dan Pemikiran, Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Jakarta: BAKOM PKB Pusat, 1994: 7-8).

pada negara Indonesia dalam berbagai bentuknya. Beberapa contoh yang sangat fenomenal adalah resistensi yang didasarkan pada etnisitas²⁶ dan agama seperti munculnya Gerakan Aceh Merdeka;²⁷ gelombang di Riau; keinginan sebagian orang Papua (OPM) untuk memisahkan diri dari Indonesia;²⁸ pemaknaan otonomi daerah yang justru menjadi pintu masuk bagi pemberlakuan syariat Islam²⁹ seperti di Banten, Serang, Sulawesi Selatan, Cirebon;³⁰ serta keinginan untuk membangkitkan kembali berbagai kerajaan di Indonesia.

Ketercerabutan bangunan politik Indonesia tersebut secara menonjol ditandai oleh tiga karakter yang saling memotong.

Pertama, adanya penolakan dari sebagian kalangan bangsa Indonesia baik secara terang-terangan maupun terselubung terhadap kehadiran wajah Indonesia yang sekuler (*nation-state*).³¹ Hal ini antara lain dapat dibaca pada deretan panjang ceritera tentang pemberontakan (deligitimasi negara) dalam sejarah Indonesia. Proses deligitimasi melalui kasus DI/TII Kartosuwiryo,³² Kahar Muzakar di Sulawesi, Daud Baureuh (PRRI) serta masalah Aceh yang sampai era reformasi ini belum dapat diselesaikan dengan baik oleh bangsa Indonesia.³³

Kedua, penolakan terhadap khasanah tradisi politik yang diambil dari Indonesia atau yang dianggap berasal dari Indonesia, untuk dijadikan model bagi bangunan politik Indonesia.³⁴ Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari tidak adanya khasanah politik asli Indonesia yang dominan kemudian dipertahankan dan muncul menjadi model bagi bangunan politik Indonesia sekarang.³⁵ Hal ini ber-

beda dengan negara-negara besar lain seperti Inggris, Belanda,³⁶ Jepang,³⁷ Malaysia,³⁸ dan Thailand, yang dalam derajat tertentu masih mampu mempertahankan dan memelihara warisan khasanah politik masa lalu untuk menjadi modal awal untuk membangun struktur politik modern yang mendapatkan dukungan dari nilai-nilai yang hidup pada komunitas tersebut. Dengan modal tersebut, mereka tidaklah membangun dari nol, dan bisa menghindari atau paling tidak mereduksi proses-proses yang ahistoris.

Dengan kondisi yang tercerabut dari akar budayanya itu, bangunan politik Indonesia menjadi rapuh karena tidak memiliki tempat berpijak pada kesadaran hati atas nilai-nilai yang hidup pada bangsa Indonesia. Bangunan politik Indonesia menjadi mengapung dan tercerabut, bahkan menjadi proses transisi yang tidak berujung. Hal tersebut menyimpan bom waktu yang siap diledakkan oleh sebagian warga bangsa yang termarginalisasi dari bangunan politik negara Indonesia tersebut, jika kondisi memungkinkan sebagaimana telah berkali-kali muncul dalam sejarah Indonesia.

Ketiga, bahwa sebagian warga bangsa Indonesia juga menolak model bangunan politik Indonesia yang berasal dari Islam, sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah Indonesia, misalnya dapat dibaca pada peristiwa *dead lock* sidang konstituante ketika terjadi perdebatan dalam memilih dasar negara Indonesia itu; apakah Pancasila, Islam, atau Sosialis?³⁹ Sejak Indonesia merdeka sampai dengan era reformasi, perdebatan tersebut belum selesai tetapi masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal dan disebabkan oleh jawaban-jawaban yang mengambang.

Kasus pro-kontra tentang RUU Sisdiknas terutama pasal 13, tentang kewajiban sekolah formal untuk menyelenggarakan pendidikan agama serta diajarkan oleh guru yang agamanya sama,⁴⁰ dapat dibaca sebagai

²⁶ Indra J Piliang, "Dari Masyarakat Aliran ke Masyarakat Etnik", dalam *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, CSIS, Jakarta, 2003: 223.

²⁷ Kompas, dalam rubrik Fokus, "Aceh antara GAM dan komoditas Politik" 4 Mei 2003: 29.

²⁸ Kompas, "Semangat Separatisme di Papua" tanggal 25 Februari 2003 hal 6.

²⁹ "Otonomi Daerah, Selamat Datang Syariat Islam" dalam *Jurnal Politik Akses* vol. 1, No. 1, Februari 2001.

³⁰ Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*, Logos, Jakarta, 2001, hal. 7-10.

³¹ Tentang konsep nasionalisme dan negara kebangsaan, lihat Paul Gilbert, *The Philosophy of Nationalism*, Westview Press, USA, 1998: 4-8.

³² Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Grafiti, Jakarta, 1990.

³³ Nazarudin Samsudin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1989, hal 49-90.

³⁴ Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina -Negara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX, Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta, (1985: 97-130). Lihat juga G. Mudjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa, Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*, Kanisius, Yogyakarta: 1987, hal. 15-101.

³⁵ Fachry Ali, *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*, Gramedia, 1986: 150. Dalam derajat tertentu perspektif teoritis yang dipakai dalam kajian ini tidak sejalan dengan perspektif yang ditawarkan oleh Fachry Ali, yakni tidak menyetujui bahwa bangunan politik Indonesia modern adalah merupakan pantulan dari

konsep kekuasaan Jawa, yang terjadi adalah lebih pada politisasi simbol-simbol Jawa, bukan implementasi simbol-simbol Jawa dalam arti yang sebenarnya, yang berakibat merugikan bagi ada manipulasi dan distorsi pada konsep kekuasaan Jawa.

³⁶ Eva Etzioni-Halevy, *Bureaucracy and Democracy A Political Dilemma*, Routledge dan Kegan Paul, London, 1983, Khususnya bab tentang "The Development of Western Bureaucracy: Overview and Explanation", hal. 101-28.

³⁷ Moore Barington, *Fasisme Asia: Jepang Revolusi dari Atas: Jawaban Kelas Penguasa terhadap Ancaman-Ancaman Lama dan Baru*, dalam Sartono Kartodirdjo, LP3ES, Jakarta, 1984, hal. 185-212.

³⁸ Hussin Mutalib, *Islam dan Etnisitas Perspektif Politik Melayu*, LP3ES, 1996, hal. 1-15.

³⁹ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959, Grafiti, Jakarta, 1995: 102-118). Lihat juga A. Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan -Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, LP3ES, Jakarta: 1985, hal. 139-142.

⁴⁰ Lihat Suara Muhammadiyah, "Bahaya Pendidikan yang Sekuler", No. 09 Th ke-88, 1-15 Mei 2003, 29 Shofar-13

masih tetap hidupnya pandangan yang menolak kehadiran agama (Islam) dalam wilayah publik dalam derajat yang berbeda dengan penolakannya pada Islam sebagai ideologi negara atau Piagam Jakarta sebagai dasar negara.

Kondisi kehidupan politik seperti dilukiskan di atas, dalam perjalanannya telah membawa Indonesia mengalami stagnansi, bangunan politik dan perangkatnya menjadi tidak berdaya untuk menggerakkan bangsa Indonesia ke arah kehidupan bangsa yang jaya, makmur, dan stabil.

E. Mengambangnya Negara

Untuk rumusan masalah yang pertama, tentang benarkah Indonesia sebagai *floating state*? Kerangka konseptual teoritik yang akan dipakai untuk memecahkan permasalahan ini dapat dikemukakan berikut ini. Untuk membuktikan "*stateness*" Indonesia dapat dilacak serta diukur dari indikator-indikator sebagai berikut; *Pertama* diukur dari daya terima (legitimasi) kekuasaan negara untuk bisa menghegemoni. Jika negara memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyatnya ataupun kekuatan politik di luar negara, berarti dapat dibaca bahwa negara tidak mengambang. Akan tetapi jika legitimasi negara lemah, sehingga negara bisa memiliki daya terima yang kuat untuk melakukan hegemoni, maka dalam posisi ini negara memiliki indikator sebagai *floating state*.

Indikator kedua, dilihat dari kesepihakan dalam memaknai negara baik kekuasaan, kewenangan dan perannya. Jika dalam memaknai negara itu sendiri, baik kekuasaannya, kewenangan dan perannya hanya diakui oleh negara saja, sementara itu elemen-elemen seperti kekuatan lokal maupun kekuatan politik Islam tidak bisa mengakui kewenangan dan peran yang melekat pada institusi negara, maka dapat dibaca bahwa negara tersebut mengalami *floating state*. Atau juga kewenangan negara itu hanya diterima oleh sebagian kekuatan lokal, sedangkan kekuatan lokal yang lain serta kekuatan Islam menolak, maka juga dapat diartikan bahwa negara dalam derajat tertentu mengalami *floating state*. Dengan rumusan lain dapat dinyatakan bahwa, jika elemen-elemen negara yang diwakili antara lain oleh kekuatan politik lokal dan politik Islam dapat menerima kewenangan serta peran yang melekat

Rabiul Awwal, 1424 H, hal 8-9.

pada negara maka negara tersebut bukan termasuk *floating state*.

Indikator yang ketiga, dilihat dari kesesuaian antara visi lokal dengan visi nasional, kesesuaian visi etnis dengan visi nasional, kesesuaian visi Islam dengan visi nasional. Jika tidak ada kesesuaian antara visi lokal, visi etnis, dan visi Islam dengan visi nasional negara, maka dapat dibaca bahwa negara mengalami *floating state*. Dengan terjadinya ketidaksesuaian antara visi nasional negara dengan visi kekuatan lain yang diwakili oleh visi lokal, etnis, dan Islam, maka berpeluang besar untuk terjadinya disfungsi institusi negara. Jika institusi negara mengalami disfungsi, tidak dapat menjalankan fungsi-fungsinya yang mendasar seperti; menghadirkan rasa aman, memberikan hak hidup, menjamin kemerdekaan, melindungi hak milik, maka kehadiran negara tidak dirasakan kemanfaatannya. Negara menjadi kehilangan alasan yang kuat untuk tetap ada dan beroperasi. Secara lebih konkrit disfungsi institusi negara tersebut dapat dilihat dari tidak berfungsinya pemerintahan yang ada sebagai representasi dari institusi negara.

Perspektif lain yang dapat membantu untuk membaca apakah negara Indonesia mengalami *floating state*, dapat ditemukan argumen dasarnya dari dua sisi. Yang pertama dari tinjauan sudut sejarah terbentuknya negara Indonesia;⁴¹ keterkaitannya dengan struktur sosial, sistem pendidikan, hukum yang ada saat negara Indonesia terbentuk. Dengan model pembacaan seperti ini akan ada peluang untuk memahami bahwa, sesungguhnya negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebenarnya dilihat dari sisi struktur sosial yang ada waktu itu; sistem hukumnya, sistem ekonominya, bahkan ideologi yang ada sudah didisain lebih dahulu selama beratus-ratus tahun oleh penjajah secara sistemis. Sehingga ketika merdeka secara politik menjadi tidak banyak memiliki pilihan kecuali hanya meneruskan rekayasa sosial, politik, ekonomi, peradaban yang dilakukan oleh penjajah khususnya Belanda.⁴²

Cara yang kedua untuk membuktikan bahwa negara Indonesia sebagai *floating state*, ialah dengan melihat bagaimana kerja lembaga ini serta reaksi penerimaan masyarakat Indonesia, semenjak didirikannya negara Indonesia sampai waktu terakhir yang mungkin untuk

⁴¹ Lihat Bantarto Bandoro, Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia, CSIS, Jakarta, 1995, hal. 1-40.

⁴² Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Gramedia, Jakarta, (1990: 36). Lihat juga H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, LP3ES, Jakarta, (1983: 915).

diteliti (1945-2004). Dengan mencermati reaksi berbagai kelompok masyarakat Indonesia, misalnya kelompok yang bergabung dalam ikatan etnis tertentu, kelompok agama, negara-negara pribumi, akan dapat diketahui apakah negara Indonesia memperoleh dukungan yang kuat dari kekuatan-kekuatan tersebut.⁴³

Dengan melakukan penggabungan dua model pembacaan sebagaimana dikemukakan di atas, memungkinkan didapatkan suatu perspektif teoritis alternatif tentang Indonesia sebagai *floating state*. Untuk menghasilkan kerangka yang orisinal tentang *floating state*, maka perlu dilakukan pengkajian secara mendalam pada dua hal sebagaimana telah disebutkan; yaitu sejarah terbentuknya negara Indonesia dan kaitannya dengan struktur sosial yang ada pada saat itu, serta tanggapan masyarakat Indonesia tentang kinerja Institusi yang bernama Indonesia. Penelitian ini berkepentingan untuk melakukan pengkajian pada hal tersebut.

F. Struktur Politik Indonesia Baru

Kerangka teoritik untuk membedah permasalahan bagaimanakah konstruk struktur politik Indonesia Baru, dapat didekati melalui dua cara. Cara ini merupakan tindak lanjut dari kerangka teoritik yang ditawarkan untuk menjawab persoalan tentang mengapa negara Indonesia menjadi *floating state*? Cara yang pertama adalah dengan meneruskan proses menjadi Indonesia yang belum selesai. Melalui proses pelebagaan yang sejauh mungkin dapat melakukan integrasi dengan kekuatan-kekuatan politik lain yang berada di luar negara, yang keberadaannya sudah ada lebih dahulu sebelum berdirinya negara Indonesia. Kekuatan tersebut pada intinya direpresentasikan oleh kekuatan politik Islam dan kekuatan politik lokal.

Cara yang kedua ialah dengan menghilangkan sejauh mungkin terjadinya distorsi dalam proses pelebagaan serta proses integrasi. Dengan keberhasilan untuk mereduksi adanya distorsi dalam proses pelebagaan dan integrasi tersebut akan dapat dikurangi bahkan dihilangkan resistensi pada negara Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena elemen-elemen di luar negara merasa memiliki terhadap institusi negara Indonesia dan tidak memelihara kecurigaan akan kehilangan

⁴³ Untuk legitimasi Pemerintahan Orde Baru lihat Mochtar Pabottingi, "Dilema Legitimasi Orde Baru: Bayangan Krisis politik dan Arah Pemecahannya", dalam Menelaah kembali Format Politik Orde Baru, Gramedia, Jakarta, (1995: 3-38)

hak hidupnya.

Pembahasan dan analisis rumusan permasalahan yang ketiga adalah, bagaimanakah konstruksi bangunan politik Indonesia Baru yang kokoh (settlement agreement) memungkinkan untuk mendapatkan dukungan dari nilai-nilai sosial, budaya, moralitas dan agama di Indonesia?

Kerangka teoritis untuk rumusan ini adalah sebagai berikut; Bahwa perspektif tentang konsep *nation-state* (negara kebangsaan Indonesia) sebagai pilihan yang sudah dipraktekkan oleh bangsa Indonesia (elit politiknya) melalui keputusan politik BPUKI dan PPKI tahun 1945, menunjukkan bahwa bangunan politik yang didasarkan pada gagasan sekuler *nation-state*⁴⁴ yang pada awalnya merupakan perlawanan pada doktrin gereja, adalah tidak cocok dan ahistoris dengan kondisi di Indonesia. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan negara Indonesia berdiri dan merdeka, dalam perjalanannya justru telah banyak berhutang pada struktur religio politik. Khusus dalam perjuangan meraih kemerdekaan, Islam memiliki peran yang sangat penting baik dalam posisinya sebagai simbol perlawanan pada penjajahan yang memang bertentangan dengan doktrin ajaran agama Islam, maupun dalam hal keterlibatan tokoh-tokoh dari agama Islam dalam sejarah panjang mengusir penjajah (kaum kafir). Hal ini diperlihatkan dalam perlawanan lokal terhadap penjajah⁴⁵, melalui gerakan modern seperti Partai Sarikat Islam, MIAI, Partai Masyumi⁴⁶ (Yusril Ihza Mahendra, 1999: 240-259).⁴⁷

Dengan kata lain, bangunan politik yang berakar pada negara kebangsaan yang gagasan dasarnya diimpor serta dibawa oleh bangsa penjajah memiliki dilema dan kontradiksi ketika akan dipakai oleh bangsa yang dijajah, yakni bangsa Indonesia, untuk membangun struktur politik

⁴⁴ Patrick Dunleavy and Brendan O'leary, *Theories of the State the Political of liberal Democracy*, Macmillan Education LTD, London, 1987. Lihat juga Bob Jessop, *State Theory Putting Capitalist States in Their Place*, Polity Press, British, 1990.

⁴⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Mizan, Bandung, 1999: 283-293. Mengemukakan bahwa perlawanan yang dilakukan untuk mengusir penjajah dari bumi nusantara telah dipelopori oleh kalangan ulama Islam seperti dipelopori oleh seorang ulama bernama Al-Palimbani dengan ajaran Jihadnya, yang ditunjukkan melalui kitab yang ditulisnya dengan judul, *Fadh'at Al-Jihad*. Kitab ini yang kemudian menjadi rujukan utama dari Kikayat Perang Sabil yang telah mampu mengobarkan semangat orang Aceh untuk menentang penjajah Belanda selama bertahun-tahun. Demikian juga Gerakan Kaum Padri di Minangkabau, yang juga dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam Tuanku nan Rencel (Tuanku Imam Bonjol).

⁴⁶ Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*, LP3ES. Jakarta, 1995, hal. 144-179. Juga lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Politik Nasional*, Grafiti pers, 1987, hal. 44-98.

⁴⁷ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi dan Jama'at Islami*, Paramadina, Jakarta, 1999: 240-259).

ketika meraih kemerdekaan. Dilema atau kontradiksi tersebut antara lain;

1. Asumsi-asumsi yang mendasari berdirinya *nation-state* yang di dalamnya terdapat penentangan pada keterlibatan agama dalam wilayah publik (negara). Hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh sebagian besar bangsa Indonesia yang religius, yang tidak pernah memisahkan keterlibatan agama dalam wilayah publik.
2. Agama sebagai struktur *religio* politik Islam dalam kenyataan memiliki peran kesejarahan yang besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari sisi penggunaan simbolnya, nilai-nilai, kelembagaan, maupun tokoh-tokohnya. Ini membawa konsekuensi sejarah atas kepemilikan hak untuk ikut mengatur, mengisi bangunan politik Indonesia.
3. Pembangunan politik dalam kerangka negara kebangsaan yang mensyaratkan adanya sekularisme, sebagaimana telah dipraktekkan dalam pemerintahan Orde Baru yang ternyata berakhir dengan kegagalan, mendapatkan resistensi dari masyarakat Indonesia. Telah menguras banyak energi bangsa, menimbulkan ketidakstabilan politik, bahkan krisis nasional. Kasus GAM, OPM, dan RMS adalah ikon politik yang menunjukkan adanya resistensi pada negara nasional tersebut.

Dengan mempertimbangkan konsepsi di atas, maka perlu dirumuskan suatu kerangka teoritik tentang bangunan politik Indonesia Baru, yang tidak mengapung di atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam hati masyarakat Indonesia.

Secara garis besar karakter bangunan politik Indonesia Baru yang membumi di hati masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Bangunan politik modern yang tidak membunuh pemikiran dan khasanah politik yang hidup di Indonesia
2. Bangunan politik Indonesia baru tidak berangkat dari gagasan negara sekuler karena bertentangan dengan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia.
3. Bangunan politik tersebut merupakan perpaduan antara gagasan struktur *religio* politik dengan gagasan negara kebangsaan yang religius.

Perspektif teoritis yang dipakai oleh para peneliti terdahulu yang sudah terlanjur mapan dan menjadi *mainstream* berkaitan dengan bangunan politik Indonesia, pada umumnya tidak secara kritis mempertanyakan asumsi-asumsi, ideologi, serta konteks sosial kemasyarakatan di mana gagasan tentang negara kebangsaan itu dilahirkan. Pada umumnya bersifat *taken for granted* dengan perspektif teoritis yang sudah mapan bahwa gagasan tentang negara kebangsaan itu serta merta sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam alam pikiran bangsa Indonesia. Sebagai akibatnya, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema negara⁴⁸ (bangunan politik Indonesia), memiliki bias mendalam dengan teori politik barat yang sekuler yang tidak memberikan tempat bagi agama dalam wilayah publik. Akibatnya penelitian tersebut gagal untuk membedah dan memecahkan persoalan yang tumbuh dan berkembang pada diri bangsa Indonesia secara akurat dan memadai.

Analisis-analisis yang dihasilkan memiliki bias negara dan tidak secara objektif menempatkan variabel agama (Islam) sebagai struktur *religio* politik. Padahal sebagaimana dikonstantasikan oleh W.F. Wertheim (1999)⁴⁹ dalam bukunya yang monumental, ada berbagai macam penafsiran ide nasionalisme oleh kalangan-kalangan yang berbeda di Indonesia; kalangan Islam berbeda dengan kalangan priyayi, berbeda pula dengan pemahaman kalangan elit Indo tentang nasionalisme. Gagasan nasionalisme (sekuler) dari awal telah mengundang sikap kritis terutama pada kalangan Islam. Kalangan Islam tidak bisa menerima begitu saja ide nasionalisme untuk dipakai sebagai ideologi gerakan dalam meraih kemerdekaan maupun untuk menata dan mendesain struktur Indonesia setelah merdeka. Hal demikian disebabkan kalangan Islam sebelumnya sudah memiliki ideologi sendiri yang karena sebab-sebab rekayasa dan pilihan penjajah Jepang yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan politik pada saat itu, lebih memilih gagasan nasionalisme beserta tokoh-tokohnya untuk mengelola negara Indonesia. Karena lebih mendapatkan angin dan kesempatan, gagasan yang kemudian lebih berkembang pada saat

⁴⁸ Lihat Purwo Santoso, "Bias epistemologis Konseptualisasi Interaksi Negara-Rakyat" dalam Jurnal Ilmu sosial dan Politik UMY, Edisi 1 Th.X, Februari 2001: 1-17.

⁴⁹ W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition, a Study of Social Change*, (terj) Masyarakat Indonesia dalam Transisi Studi Perubahan Sosial, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999.

Indonesia merdeka adalah gagasan nasionalisme.⁵⁰

Untuk membahas rumusan permasalahan, bagaimanakah konstruksi bangunan struktur politik Indonesia Baru? dengan mengikuti kerangka konseptual sebagaimana dikemukakan di atas agar bisa menghasilkan suatu kerangka teoritis yang orisinal, membutuhkan eksplorasi yang mendalam dan luas tentang bangunan politik Indonesia yang berakar pada *nation-state*, asumsi-asumsi yang melatarbelakanginya, konteks sosial-politik kelahiran, *nation-state* di Indonesia, perjalanan serta dinamika penerapan *nation-state* di Indonesia. Dengan eksplorasi tersebut akan diketahui dengan mendalam karakter bangunan politik Indonesia yang berakar pada gagasan *nation-state* serta kelemahan dan kelebihanannya. Dengan cara seperti itu maka pada tahap berikutnya akan dapat diharapkan lahir suatu perspektif alternatif tentang bangunan politik Indonesia baru. Meminjam ungkapan Syafii Maarif bahwa antara Islam, keindonesian, dan kemanusiaan, tidak saja bisa berjalan bersama dan seiring tetapi ketiganya dapat menyatu dan saling mengisi untuk membangun taman sari yang khas Indonesia.⁵¹

G. Penutup

Proses gelombang demokratisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia tak terhindarkan juga memasuki wilayah Indonesia. Proses demokratisasi tersebut acapkali ditandai oleh ditumbangkannya rezim lama serta sistem politik lama diganti dengan rezim baru, serta sistem politik baru yang dianggap lebih sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakat. Proses penumbangan struktur politik lama seharusnya diikuti dengan hadirnya proses institusionalisasi politik. Jika sampai terjadi proses penumbangan struktur lama tidak diikuti proses institusionalisasi yang berhasil maka proses demokratisasi memiliki kemungkinan besar untuk menemui kegagalan, dan tidak bisa berlanjut dengan proses konsolidasi demokrasi. Lebih dari itu ada kemungkinan tatanan masyarakat akan kembali lagi ketatanan lama yang otoriter.

Hal tersebut dikarenakan proses demokratisasi secara faktual

⁵⁰ Lihat Harry J Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, *Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1980, hal. 205-234.

⁵¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesian dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*, Penerbit Mizan bekerjasama dengan Institute for Culture and Humanity, Bandung, 2009, khususnya hal 300-308.

acapkali menimbulkan adanya ketidakteraturan (anarkhisme), menurunnya jaminan keamanan, tidak secara cepat adanya bukti-bukti akan tiba saatnya zaman kesejahteraan. Hal tersebut masih sering diperparah oleh adanya persaingan antara elit dengan arogansi politik yang tinggi, sulit untuk melahirkan konsensus untuk melakukan proses konsolidasi demokrasi.

Dengan rumusan lain, dapat dinyatakan bahwa proses demokratisasi yang seharusnya diikuti oleh proses konsolidasi demokrasi acapkali dalam realitas kehidupan politik sulit untuk diwujudkan. Fenomena politik seperti itu dapat mengurangi kepercayaan dan pesona demokrasi dimata rakyat, bahkan lebih jauh dapat menjerumuskan negara jatuh dalam posisi *floating state*, mengapung, dan lemah. Menghadapi persoalan pelik dan krusial tersebut salah satu jalan keluar yang dapat diusulkan adalah perlunya dirumuskan suatu model pendidikan politik yang mampu memadukan antara aspirasi masyarakat serta dinamika global.

Lebih dari itu dituntut hadirnya suatu model pendidikan politik yang memiliki kekhasan Indonesia (*genuine Indonesia*)—sejalan dengan cita-cita melakukan indigeousasi ilmu sosia— termasuk didalamnya adalah suatu model pendidikan politik yang merefleksikan nilai-nilai religius. Pendidikan politik yang mampu mendorong untuk berhasilnya proses ko-integrasi antara negara dengan struktur *religio* politik Islam.⁵² Bukan model pendidikan politik yang hanya merupakan copy dan derifat dari ideologi sekuler yang bertentangan dengan ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut mempertimbangkan kondisi empiris masyarakat Indonesia yang religius serta adanya aspirasi politik seperti tercermin dari hasil pemilu sejak Pemilu 1955, 1999, 2004, serta Pemilu 2009, yang menunjukkan adanya kekuatan riil struktur *religio* politik yang direpresentasikan oleh partai-partai politik yang berplatform religius.

⁵² Lihat Noah Fieldman, *Constitutionalism in the Muslim World*, dalam *Issues of Democracy, Constitutionalism and Emerging Democracies*, March 2004, Volume 9 Number 1, Page 33-37. Diantara tesis penting Dr. Noah Fieldman adalah bahwa antara Islam dan demokrasi adalah tidak bertentangan. Sekalipun demokrasi memiliki pandangan bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan sedangkan Islam memiliki pandangan bahwa Allah lah yang memiliki kedaulatan yang diwujudkan dalam bentuk hukum Allah, tetapi dalam implementasi kehidupan manusia muslim, ajaran Tuhan tersebut diberikan kebebasan kepada manusia untuk menafsirkannya sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban masing-masing sepanjang terkait dengan persoalan muamalah keduniawian merujuk pada ungkapan Nabi Muhammad Saw "Antum alamu bi umuri dunyakum", kamu sekalian lebih tahu tentang persoalan duniawi.